

Evaluasi Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar

Zahrie Ahmadie¹ Sufian Hamim²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: zahrieahmadie@student.uir.ac.id

Abstract

The Buluh Cina Nature Tourism Park (TWA) has significant tourism potential and ecological value for the surrounding community, although challenges still exist. This situation highlights the need for an evaluation of development strategies to optimize the tourism potential and socio-economic benefits of the TWA more evenly. The purpose of this study is to analyze and explain the development strategy of the Buluh Cina Village Nature Tourism Park in Kampar. This research employed a mixed-method approach, including interviews with selected informants and questionnaires distributed to TWA visitors, with the results analyzed both qualitatively and quantitatively. The findings indicate that the development strategy of the Buluh Cina Nature Tourism Park is generally good, reflecting effective management and development that benefits both visitors and the community. Indicators such as effectiveness, adequacy, responsiveness, appropriateness, and development processes are also rated good, suggesting that policies and implementation are on target and sustainable. However, some indicators are only fairly good, namely efficiency and equity. Efficiency has not been optimal due to budget limitations, underutilization of resources, and facilities and services that are not fully balanced with the park's potential and visitor numbers. Equity is also limited because the economic benefits of the TWA are not yet evenly distributed among the community, being dominated by certain groups, influenced by the limited role of the community, village authority, and the less-than-optimal empowerment of the tourism awareness group (Pokdarwis).

Key Words : Strategy Evaluation, Nature Tourism Park

Abstrak

Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina memiliki potensi wisata dan nilai ekologis yang penting bagi masyarakat sekitar, meskipun masih terdapat tantangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi strategi pengembangan yang lebih optimal agar potensi wisata dan manfaat sosial ekonomi TWA dapat dirasakan secara lebih merata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan strategi pengembangan objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar. Metode penelitian ini campuran, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih serta menyebarkan kuesioner kepada responden pengunjung TWA dan hasilnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina secara umum tergolong baik, menunjukkan pengelolaan dan pengembangan yang cukup efektif dan bermanfaat bagi pengunjung maupun masyarakat. Indikator seperti efektivitas, kecukupan, responsivitas, ketepatan, dan proses pengembangan juga berada pada kategori baik, menandakan kebijakan dan pelaksanaan sudah tepat sasaran dan berkelanjutan. terdapat indikator yang masih cukup baik, yaitu efisiensi dan pemerataan. Efisiensi belum optimal karena keterbatasan anggaran, pemanfaatan sumber daya yang kurang maksimal, serta fasilitas dan pelayanan yang belum sepenuhnya seimbang dengan potensi dan jumlah pengunjung. Pemerataan juga belum maksimal karena manfaat ekonomi TWA belum dirasakan merata oleh masyarakat, masih didominasi kelompok tertentu, dipengaruhi oleh keterbatasan peran masyarakat, kewenangan desa, dan pemberdayaan Pokdarwis yang belum optimal.

Key Words : Evaluasi Strategi, Objek Taman Wisata Alam

Pendahuluan

Pengembangan wisata alam Indonesia pada dasarnya menegaskan prinsip keberlanjutan dan adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menuntut perlindungan ekosistem. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar potensi lokal dapat terpetakan, dimanfaatkan secara bijak, dan memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, pengembangan wisata alam diharapkan mampu menyeimbangkan aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 telah merumuskan lima program wisata mulai dari (1) transformasi digital: tourism 5.0, (2) gerakan wisata bersih, (3) pariwisata naik kelas: gastro, marine, dan wellness tourism, (4) event bertaraf global dengan IP Indonesia, (5) Pengembangan desa wisata berbasis komunitas (Sutiarso, 2025:2). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaan kawasan wisata skala desa dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa serta menjadi arah kebijakan bagi pengelolaan destinasi wisata ke depan. Pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan tanpa adanya perencanaan yang matang, karena perencanaan merupakan fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan program dan pengembangan destinasi wisata.

Kawasan yang berstatus Taman Wisata Alam (TWA) adalah bagian dari upaya konservasi yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengaturan teknis mengenai pengusahaan pariwisata di kawasan konservasi juga diatur dalam peraturan pelaksana kementerian yang mengatur tata cara pemanfaatan dan persyaratan pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Riau, baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, dengan luas keseluruhan $\pm 440.539,59$ hektar.

TWA Buluh Cina ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.468/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dengan luas ± 1000 hektar, yang berasal dari lahan masyarakat Desa Buluh Cina yang dihibahkan menjadi TWA Buluh Cina tanpa ganti rugi. Kemudian TWA Buluh Cina ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014, dengan luas 963,33 hektar. Tipe ekosistem hutan TWA Buluh Cina didominasi hutan dataran rendah dan rawa air tawar.

Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina merupakan salah satu kawasan konservasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Kehadiran gajah di kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menawarkan pengalaman wisata alam yang edukatif dan berorientasi pada

konservasi. Selain berfungsi sebagai kawasan wisata, keberadaan gajah juga memperkuat peran TWA Buluh Cina sebagai area perlindungan satwa yang dilindungi sekaligus simbol penting pelestarian ekosistem hutan rawa dan sungai di sekitarnya. Namun demikian, pengelolaan konservasi gajah memerlukan perhatian khusus agar kegiatan wisata tidak mengganggu kehidupan satwa tersebut serta tetap menjaga keseimbangan antara fungsi konservasi dan aktivitas taman wisata. Selain gajah, di TWA Buluh Cina terdapat danau, outbond jembatan, sampan, gazebo, rest area, jalur trek hiking, dan spot-spot foto.

Data jumlah kunjungan objek wisata TWA Buluh Cina dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Jumlah Kunjungan Objek Wisata TWA Buluh Cina Tahun 2020-2025

Bulan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	1120	982	772	102	170	0 (tutup)
Februari	980	209	543	135	165	6
Maret	890	451	552	142	20	11
April	450	873	743	80	142	15
Mei	380	355	256	237	157	15
Juni	620	688	296	105	132	14
Juli	900	1060	720	226	120	778
Agustus	1040	713	596	125	142	278
September	780	565	422	113	155	71
Oktober	760	311	416	67	115	51
November	760	590	315	92	40	20
Desember	861	490	527	88	0 (tutup)	24
Total	9541	7287	6158	1512	1358	1283

Sumber: Kepala Resort TWA Buluh Cina, 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina selama periode 2020 hingga 2025 yang memperlihatkan adanya penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan mencapai 9.541 orang, namun menurun menjadi 7.287 orang pada tahun 2021, dan terus berkurang menjadi 6.158 orang pada tahun 2022. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan total hanya 1.512 pengunjung, hingga akhirnya pada tahun 2024 tercatat hanya 1.358 pengunjung, bahkan bulan Desember 2024 hingga Januari 2025 tidak tercatat tidak ada kunjungan karena kawasan ditutup sementara akibat banjir dan baru dibuka tanggal 25 Februari 2025.

Pada dasarnya BBKSDA bersama Pemerintah Desa Buluh Cina pernah melaksanakan strategi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan yaitu dengan mengundang influencer Kota Pekanbaru untuk meliput dan mempromosikan di media sosial. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan beberapa Sekolah Negeri untuk menjadikan TWA sebagai lokasi studi tour.

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan penulis di TWA Buluh Cina didapatkan fenomena seperti: Masih minimnya peran Dinas Pariwisata dalam pendampingan serta pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Negeri Enam Tanjung" dan juga Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanita "Melati Indah" (Wawancara Kepala Desa Buluh Cina). Berdasarkan

dokumen RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2025, kegiatan ini sudah diusulkan untuk tahun 2025 tetapi hingga penghujung tahun belum ada realisasi di TWA sampai sekarang. Kondisi saat ini banyak sarana dan prasarana seperti jembatan kayu, gazebo yang rusak dan terbengkalai. Selanjutnya kondisi akses jalan saat ini menuju ke TWA cukup rusak dan licin saat musim hujan (observasi di lapangan, Oktober 2025). Pada tahun 2024 terdapat kenaikan tarif tiket sebesar 100% yang sebelumnya Rp.5000 untuk hari biasa dan Rp.10.000 untuk hari libur menjadi Rp.10.000 untuk hari biasa dan Rp.15.000 untuk hari libur (Observasi di loket kawasan TWA Buluh Cina, 2025). Pada saat musim penghujan, Desa Buluh Cina banjir dan TWA dipastikan tidak dapat beroperasi. Hal ini terakhir terjadi di bulan Desember 2024 hingga Januari 2025 TWA Buluh Cina sempat ditutup karena adanya peningkatan volume air dari PLTA Koto Kampar (Wawancara Kepala Desa Buluh Cina). Pengelolaan TWA mulai dari retribusi dan anggaran dikelola sepenuhnya oleh BBKSDA Riau, sehingga desa tidak menerima pendapatan apapun. Pokdarwis desa kesulitan untuk mengembangkan objek wisata ini, apalagi pemerintah Desa Buluh Cina tidak menganggarkan pengembangan wisata ini baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 tahunan, maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan desa.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karya Thea Monika & Aditha Agung Prakoso (2023), Nofia Sri Yenti dkk. (2024), dan Indira Aprilia Salsabila (2023), yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam mengevaluasi pengelolaan dan pengembangan objek wisata berbasis desa. Ketiganya menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program wisata. Selain itu, semua penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data lapangan yang mendalam. Fokus utama dari ketiganya adalah menilai efektivitas dan kendala strategi pengembangan objek wisata agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Perbedaan utama sebagai novelty penelitian menggunakan mixed methods, dan juga penelitian ini berupaya menemukan proses pengembangan melalui upaya prefentif untuk menghindari minimnya pemanfaatan potensi suatu kawasan wisata, dan juga kuratif sebagai upaya penyelesaian dan perumusan strategi pengembangan objek wisata.

Perbedaan lainnya terletak pada lokasi, fokus analisis, dan pendekatan evaluasi. Penelitian Thea Monika dan Aditha Agung Prakoso (2023) menitikberatkan pada elemen desa wisata seperti seting, sumber daya, pengelolaan, dan manfaat di Desa Wisata Pacarejo, Gunungkidul. Sementara penelitian Nofia Sri Yenti dkk. (2024) lebih fokus pada evaluasi kebijakan dan pengelolaan kepariwisataan di objek wisata Danau Diatas, Solok, dengan menilai faktor pendukung dan penghambat kebijakan daerah. Penelitian Indira Aprilia Salsabila (2023) berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo, menggunakan model Bridgman dan Davis (2000). Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi strategi pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yang menyoroti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis alam.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan strategi pengembangan objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar.

Tinjauan Pustaka

Zahrie Ahmadie dan Sufian Hamim

Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 / 2026

Konsep Evaluasi

Menurut Soedijono (2011:80) evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program, kebijakan, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bukan hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup analisis terhadap proses pelaksanaan, efektivitas strategi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi berperan penting sebagai alat pengendali dan pengambil keputusan yang membantu lembaga atau organisasi memperbaiki kinerja dan mengoptimalkan pencapaian tujuan.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2016:108), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Menurut William N. Dunn (2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas berarti sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang sesuai dengan rencana.
2. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat untuk mencapai hasil maksimal tanpa pemborosan waktu, tenaga, atau biaya.
3. Kecukupan menunjukkan sejauh mana hasil dari suatu kegiatan mampu memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang menjadi sasaran program.
4. Pemerataan mengacu pada pemerataan manfaat, yaitu sejauh mana hasil kegiatan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran.
5. Responsivitas berarti kemampuan suatu program atau kebijakan dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat dengan cepat dan tepat.
6. Ketepatan menunjukkan sejauh mana program atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kondisi yang sebenarnya diperlukan.

Proses evaluasi biasanya melibatkan tiga aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Aspek input mencakup sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, dana, dan sarana prasarana. Aspek proses menilai bagaimana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, sementara aspek output berfokus pada hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas suatu strategi atau program, sehingga dapat diketahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan (Nugroho, 2016:154).

Konsep Strategi

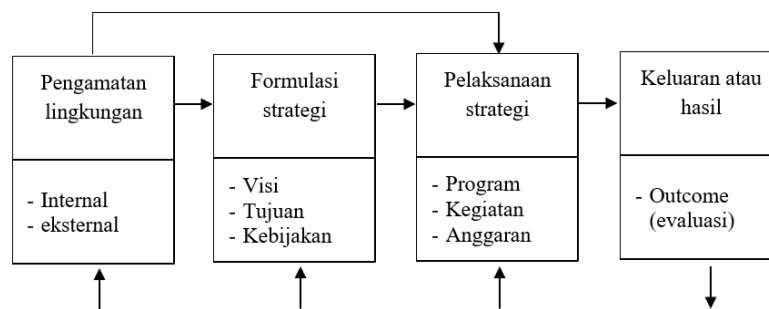
Menurut Hamim (2013:31) perumusan strategi merupakan upaya pengembangan jangka panjang dari sebuah manajemen yang memanfaatkan kesempatan serta mengantisipasi ancaman lingkungan yang dilihat dari kapasitas serta kekurangan manajemen yang ada. Hal ini meliputi penentuan visi misi strategis untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan namun tetap mengacu pada kebijakan.

Menurut Natsir (2019:59) strategi dapat dipahami sebagai pola tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang dan tantangan eksternal yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, strategi selalu menekankan pentingnya analisis

situasional agar keputusan yang diambil selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktiknya, strategi menjadi alat penting dalam menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien dan bagaimana organisasi merespons dinamika lingkungan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Hamim (2013:2) menjelaskan bahwa proses manajemen harus meliputi enam elemen dasar yaitu pengamatan lingkungan, rumusan strategi, strategi yang diharapkan, pelaksanaan, outcome dan umpan balik dan dalam proses pembangunan hal ini bisa digambarkan dalam proses sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Manajemen Strategi Sufian



Sumber: Hamim (2013:2)

Selanjutnya Winarno (2016:185) menjelaskan bahwa strategi berperan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah atau lembaga publik perlu menyusun strategi yang efektif agar setiap program dan kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan, memaksimalkan potensi daerah, serta menciptakan koordinasi yang sinergis antar instansi dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Konsep Manajemen Pariwisata

Menurut Sutiarto (2025:3) manajemen pariwisata merupakan suatu proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sektor pariwisata. Tujuan utama manajemen pariwisata adalah mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki suatu daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan wisata dapat diatur secara sistematis sehingga mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal.

Menurut Amerta (2019:95) manajemen pariwisata juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan destinasi agar aktivitas wisata tidak menimbulkan kerusakan ekologis maupun degradasi budaya. Setiap bentuk pengembangan wisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, serta keberlanjutan manfaat jangka panjang bagi daerah tujuan wisata. Sedangkan menurut Fandeli (2011:48) potensi wisata dapat berupa sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Sumberdaya pariwisata diartikan

sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia yang dapat memenuhi keinginan wisatawan.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian *mixed method*. Menurut Sugiyono (2016:15) adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan dua metode utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dalam satu studi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini digunakan ketika satu jenis data saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian secara utuh. Melalui metode kuantitatif, peneliti dapat memperoleh data numerik yang terukur dan objektif, sedangkan metode kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan persepsi responden terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini membantu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kondisi nyata pengelolaan wisata alam di Desa Buluh Cina berdasarkan wawancara dengan informan dan kuesioner dengan masyarakat pengunjung.

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Taman Wisata Alam Buluh Cina yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena pengelolaan TWA Buluh Cina masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pendampingan dari Dinas Pariwisata Kampar terhadap Pokdarwis, meski kegiatan pembinaan telah diusulkan dalam RENJA 2025. Kondisi fasilitas sarana prasarana, akses jalan juga sulit dilalui saat hujan. Tarif tiket naik 100% pada 2024, namun belum diikuti peningkatan pelayanan. Selain itu, kawasan sering banjir akibat luapan PLTA Koto Kampar, menyebabkan penutupan sementara. Pengelolaan retribusi masih di bawah BBKSDA Riau, sehingga desa tidak menerima pendapatan, dan pengembangan wisata belum tercantum dalam RPJMDes maupun RKP Desa Buluh Cina.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu; Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar; Kepala Desa Buluh Cina; Kepala Resort Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina; dan Ketua Pokdarwis Negeri Enam Tanjung. Selanjutnya masyarakat pengunjung sebanyak 24 orang dipilih berdasarkan rata-rata dan pertimbangan data jumlah kunjungan objek wisata TWA Buluh Cina Tahun bulan Desember 2025.

Data primer penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dan kuesioner. Data sekunder meliputi RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 2025, RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026, Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 2024, Peta Lokasi TWA Buluh Cina dari BBKSDA Riau, Profil Desa Buluh Cina, Foto-foto kondisi terkini di TWA Buluh Cina Kampar.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data berdasarkan metode kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk data statistik diolah dengan deskriptif kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Informan pertama adalah David Hendra, S.Pi., M.Si., lahir di Batu Bersurat pada 6 April 1983 dan saat ini berusia 42 tahun. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Informan kedua adalah Azrianto, S.TP., merupakan Kepala Desa Buluh Cina yang saat ini berusia 49 tahun. Beliau

lahir di Buluh Cina pada 3 Desember 1976. Informan ketiga adalah Nofrigon merupakan Kepala Resort Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina. Beliau lahir di Tanjung pada 4 Mei 1985 dan saat ini berusia 40 tahun. Sebagai kepala resort, Nofrigon bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan sumber daya alam, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian TWA Buluh Cina sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Informan keempat yaitu Hendra, S.Sos., menjabat sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Negeri Enam Tanjung Desa Buluh Cina.

Jenis kelamin responden yang mengisi kuesioner sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 14 orang (58%) sedangkan sisanya responden perempuan dengan jumlah 10 orang (42%). Mayoritas pengunjung TWA berada pada rentang usia 20–25 tahun dengan jumlah 10 orang atau sebesar 42%. Selanjutnya, pengunjung berusia 26–30 tahun berjumlah 8 orang atau 33%. Kelompok usia 31–35 tahun sebanyak 3 orang (13%), usia 36–40 tahun sebanyak 2 orang (8%), dan usia ≥ 41 tahun hanya 1 orang (4%). Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung TWA didominasi oleh kelompok usia muda. Sebagian besar pengunjung TWA berpendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 12 orang atau 50%. Selanjutnya, pengunjung dengan pendidikan SMA berjumlah 10 orang atau 42%, sedangkan pengunjung berpendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau 8%. Data ini menunjukkan bahwa pengunjung TWA didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

Evaluasi Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar

Hasil evaluasi strategi pengembangan objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar berdasarkan hasil kuesioner, maka diketahui rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam
Desa Buluh Cina Kampar

No	Indikator	Jumlah skor total	Kategori
1.	Efektivitas	254	Baik
2.	Efisiensi	217	Cukup Baik
3.	Kecukupan	241	Baik
4.	Perataan	221	Cukup Baik
5.	Responsivitas	243	Baik
6.	Ketepatan	252	Baik
7.	Proses Pengembangan	249	Baik
Total		1.677	Baik

Sumber : Data Olahan, 2025

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan hasil evaluasi strategi pengembangan objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Kampar mendapatkan total skor 1.677 terletak pada interval antara 1.568 – 2.016 sehingga tergolong “Baik”. Indikator efektivitas, kecukupan, responsivitas, ketepatan, dan proses pengembangan seluruhnya berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan strategi pengembangan TWA secara umum telah berjalan sesuai tujuan dan dirasakan manfaatnya oleh pengunjung maupun masyarakat. Sementara itu, indikator efisiensi dan perataan berada

pada kategori cukup baik, namun tetap memberikan kontribusi positif terhadap keseluruhan capaian kinerja pengelolaan TWA.

Indikator efisiensi masih berada pada kategori cukup baik karena pemanfaatan sumber daya, khususnya anggaran dan waktu, belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran menyebabkan pengelola harus memprioritaskan kebutuhan tertentu, sehingga belum semua aspek pelayanan dan fasilitas dapat ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, pengaturan waktu layanan, jam operasional, serta kebijakan harga pada waktu tertentu dinilai masih dapat disesuaikan agar lebih efisien dan mampu meningkatkan kepuasan serta minat kunjungan wisatawan.

Indikator pemerataan juga berada pada kategori cukup baik karena manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan TWA Buluh Cina belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat telah memperoleh nilai tambah ekonomi melalui aktivitas usaha dan keterlibatan langsung di kawasan wisata, namun masih terdapat kelompok masyarakat lain yang belum merasakan dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelibatan masyarakat secara lebih luas dan adil agar manfaat pengembangan TWA dapat tersebar secara merata dan mendukung kesejahteraan bersama.

Efektivitas

Efektivitas yang diharapkan dari Strategi Pengembangan Objek Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, adalah tercapainya pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik dan kualitas destinasi melalui pengembangan sarana prasarana, pelestarian lingkungan, serta penguatan peran masyarakat lokal, khususnya melalui Pokdarwis dan pemerintah desa. Selain itu, efektivitas strategi juga diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta terjaganya fungsi konservasi kawasan, sehingga Taman Wisata Alam Buluh Cina dapat berkembang sebagai destinasi wisata alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait seperti apa peran yang dijalankan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk TWA Buluh Cina ini, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata untuk TWA Buluh Cina ini, pertama kita sudah datang langsung melihat apa saja potensi yang ada di Buluh Cina. Kita juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan kunjungan lapangan, terutama dengan menyentuh langsung ke desa dan melibatkan masyarakatnya. Potensi-potensi tersebut kemudian kita arahkan agar pengelolaannya dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di sana. Kelompok sadar wisata ini nantinya akan menjadi penggerak TWA Buluh Cina, di mana mereka juga akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan kawasan. Mungkin akan ada pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan, khususnya di bidang destinasi. Di bidang saya sendiri, yaitu bidang pemasaran pariwisata, nanti juga ada peran ekonomi kreatif, seperti bagaimana masyarakat berjualan di sana. Bidang ekonomi kreatif akan melakukan pembinaan, kemudian bagaimana mengangkat tradisi budaya, atraksi apa yang mau dikembangkan, itu masuk ke pembinaan oleh bidang kebudayaan. Integrasi dari keseluruhan ini akan menjadi satu kesatuan untuk mendukung TWA Buluh Cina menjadi sebuah destinasi yang sesuai dengan harapan kita." (David Hendra, S.Pi., M.Si, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengembangan TWA Buluh Cina dilakukan melalui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi wisata, melakukan sosialisasi dan kunjungan lapangan, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak utama pengelolaan destinasi. Dukungan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui pembinaan di bidang pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan, sehingga pengembangan TWA Buluh Cina tidak hanya berorientasi pada destinasi wisata, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa Buluh Cina berharap keberadaan TWA mampu meningkatkan pendapatan dan popularitas desa, dengan catatan adanya keseimbangan antara jumlah kunjungan wisatawan dan ketersediaan infrastruktur serta fasilitas yang memadai, agar pengembangan TWA dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.

Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara terkait apakah ada upaya atau langkah yang sudah pernah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk pengembangan TWA Buluh Cina, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Ya, kita sudah ada beberapa event yang dilaksanakan di Buluh Cina untuk mendukung pengembangan tersebut. Selama ini, pengembangan setelah fisik destinasi memang belum maksimal. Namun kita mengarahkan pengembangan melalui desa, melalui kebijakan dana desa atau kebijakan lainnya, agar sejalan dengan arah pengembangan kawasan. Contohnya, dari kementerian pernah ada pertunjukan seni dan budaya oleh komunitas, yang dikenal dengan program Indonesia. Itu pernah dilakukan di sana. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk menjadikan TWA Buluh Cina semakin dikenal. Jadi ada atraksi budaya yang bisa diangkat melalui event kementerian dan kegiatan lainnya yang cukup membantu pengembangan kawasan. Kita juga berharap Pokdarwis berperan di semua sisi dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di sana." (David Hendra, S.Pi., M.Si, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan TWA Buluh Cina telah dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan berbasis budaya sebagai strategi promosi dan penguatan daya tarik kawasan. Sumber anggaran yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, bantuan desa, serta iuran anggota menunjukkan bahwa Pokdarwis belum memiliki dukungan pendanaan yang stabil. Hal ini berdampak pada pola kegiatan yang dilakukan, yang cenderung bersifat insidental dan reaktif, yakni hanya berjalan ketika ada kegiatan tertentu di kawasan TWA.

Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara terkait apakah desa memiliki andil untuk mengembangkan TWA Buluh Cina dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Untuk memiliki andil, tentu ada, karena pengembangan itu berasal dari desa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, desa tetap ikut andil dalam pengembangan TWA. Karena kalau TWA-nya maju, itu juga menyangkut kemajuan Desa Buluh Cina. Untuk kesulitan, jelas ada. Karena kami selaku pemerintah desa tidak memiliki kebijakan dan kewenangan untuk melakukan perubahan

dalam bentuk apa pun di kawasan TWA tanpa persetujuan dari pihak pengelola TWA..” (Azrianto, S.TP, Kepala Desa Buluh Cina).”

Pemerintah Desa Buluh Cina dan Pokdarwis memiliki andil penting dalam pengembangan TWA Buluh Cina, terutama sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan potensi lokal. Pemerintah desa menyadari bahwa kemajuan TWA berbanding lurus dengan kemajuan desa, sehingga keterlibatan desa menjadi suatu keharusan. Namun demikian, peran desa masih dihadapkan pada keterbatasan kewenangan, karena setiap bentuk perubahan dan pengembangan di kawasan TWA harus melalui persetujuan pihak pengelola kawasan. Sejalan dengan itu, Pokdarwis diposisikan sebagai representasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab sekaligus hak dalam pengembangan kawasan, khususnya pada sektor pariwisata.

Karena Taman Wisata Alam Buluh Cina berstatus kawasan konservasi dan didalamnya terdapat fauna dan flora yang dilindungi, setiap orang yang masuk termasuk masyarakat sekitar pada prinsipnya tetap mengikuti aturan kunjungan yang berlaku, biasanya berupa tiket atau registrasi resmi. Ketentuan ini bukan semata-mata untuk menarik pendapatan, melainkan sebagai instrumen pengendalian aktivitas agar jumlah pengunjung, jalur yang dilalui, dan kegiatan di dalam kawasan tetap terpantau demi menjaga kelestarian ekosistem. Namun, dalam praktiknya pengelola dapat menerapkan kebijakan khusus yang lebih ramah bagi warga asli Buluh Cina, misalnya tarif khusus atau mekanisme izin tertentu yang bisa dipantau pengelola resort TWA, sehingga hak akses sosial masyarakat tetap dihormati tanpa mengabaikan fungsi utama kawasan sebagai area perlindungan.

Perataan

Berdasarkan hasil wawancara terkait keberadaan TWA ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, lalu bagaimana dampak yang diberikan, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dampaknya tentu sangat ada. Dengan adanya kekuatan magnet pariwisata yang menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata, maka akan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Mulai dari masyarakat yang berjualan, pengelolaan parkir, hingga peningkatan pendapatan desa. Selain itu, pelestarian lingkungan juga lebih terjaga. Jika kawasan ini tidak terkelola dengan baik dan tidak ada pengawasan wisata, maka berpotensi menjadi tempat aktivitas masyarakat yang tidak terkontrol dan justru merusak lingkungan. Dengan adanya sentuhan pariwisata, banyak dampak positif yang ditimbulkan, seperti peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ke depan, TWA Buluh Cina juga bisa menjadi ikon daerah, mengingat letaknya yang strategis, dekat dengan kota, serta memiliki potensi wisata alam yang bisa diandalkan. Namun memang saat ini pengembangannya belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersebar ke seluruh kecamatan. Ke depan, perlu ada kajian khusus terkait pengembangan TWA Buluh Cina, termasuk master plan, strategi pengembangan, dan promosi. Kajian ini diharapkan menjadi rekomendasi agar seluruh potensi dapat terangkat secara maksimal dan berdampak pada pengembangan ekologi serta ekonomi masyarakat.” (David Hendra, S.Pi., M.Si, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan TWA Buluh Cina memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Aktivitas pariwisata yang berkembang menjadikan kawasan ini sebagai magnet kunjungan, sehingga membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui kegiatan berjualan, jasa parkir, serta kesempatan kerja lainnya

yang secara langsung meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, pengelolaan kawasan sebagai destinasi wisata turut berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan, karena adanya pengawasan dan pengaturan aktivitas di kawasan TWA.

Secara ideal, masyarakat sekitar seharusnya memperoleh manfaat konkret dan berkelanjutan dari keberadaan kawasan wisata tersebut. Bentuknya dapat berupa prioritas keterlibatan dalam pengelolaan wisata (pemandu lokal, petugas kebersihan, pengelola parkir, penyedia jasa perahu/sampan, pengelola homestay), penguatan peran Pokdarwis dan Kelompok Tani Hutan Wanita, serta skema kemitraan konservasi yang memberi akses legal terbatas untuk kegiatan ramah lingkungan. Selain itu, desa juga dapat memperoleh bagian pendapatan melalui kerja sama resmi, misalnya dari retribusi parkir, jasa lingkungan, atau pengembangan UMKM warga sekitar.

Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara terkait apakah Dinas pernah melakukan pembinaan terhadap Pokdarwis atau kelompok tani hutan di Desa Buluh Cina, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Pokdarwis dilibatkan, tetapi hanya pada sektor pariwisata saja. Untuk bidang-bidang lain di luar pariwisata, Pokdarwis tidak dilibatkan. Harapan kami ke depannya adalah agar pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa, sehingga semua pihak bisa saling menikmati manfaat dan saling terhubung dalam pengembangan kawasan wisata ini.." (Hendra, S.Sos, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Negeri Enam Tanjung Desa Buluh Cina)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Pokdarwis dalam pengembangan TWA Buluh Cina telah dilakukan melalui berbagai bentuk pembinaan dan kegiatan, seperti pelatihan, pengangkatan tradisi lokal, serta pelaksanaan event berbasis edukasi dan budaya. Pemerintah daerah melihat Buluh Cina memiliki potensi besar, terutama pada keberadaan hutan adat, danau, serta kondisi alam yang masih alami dan didukung oleh lokasi yang strategis. Namun demikian, pengembangan potensi tersebut dinilai belum optimal karena masih membutuhkan payung hukum yang lebih kuat sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa petugas lapangan di Taman Wisata Alam Buluh Cina yang mayoritas berasal dari desa setempat, sehingga mereka memiliki peran strategis dalam menjaga efektivitas pengelolaan kawasan. Keterlibatan warga lokal membuat pengawasan lebih responsif karena mereka memahami kondisi medan, budaya, serta dinamika sosial di sekitar kawasan.

Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara terkait seperti apa bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan BBKSDA Provinsi Riau, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Kita berkoordinasi melalui momen-momen komunikasi formal, terutama dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. BBKSDA sendiri koordinasinya lebih dekat ke Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kita selalu berkoordinasi melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menyatukan persepsi. Dalam momen-momen tertentu, seperti rencana pengembangan desa dari kawasan hutan dan kegiatan lainnya, kita selalu memberikan masukan dan tetap berkoordinasi"

dengan BBKSDA." (David Hendra, S.Pi., M.Si, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar)."

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Hubungan yang terjalin sejauh ini baik dan tidak ada masalah. Apalagi saat ini kami memiliki Pokdarwis yang seluruh anggotanya adalah warga Desa Buluh Cina dan SK-nya juga diterbitkan oleh Desa Buluh Cina. Namun, mereka bekerja di dalam kawasan TWA Buluh Cina." (Azrianto, S.TP, Kepala Desa Buluh Cina)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan BBKSDA Provinsi Riau telah terjalin, meskipun dilakukan secara tidak langsung. Bentuk koordinasi lebih banyak berlangsung melalui jalur formal pemerintahan, khususnya dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penghubung utama dalam menyatukan persepsi dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan TWA. Dalam konteks pengembangan desa dan kawasan hutan, Dinas Pariwisata tetap memberikan masukan serta menjalin komunikasi dengan BBKSDA. Sejalan dengan itu, pemerintah Desa Buluh Cina menilai hubungan yang terbangun berjalan dengan baik dan harmonis, ditandai dengan keterlibatan Pokdarwis yang anggotanya berasal dari masyarakat desa dan bekerja di kawasan TWA.

Kesimpulan

Berdasarkan rekapitulasi penilaian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dan pengembangan TWA Buluh Cina telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi pengunjung maupun masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Ditinjau per indikator, efektivitas, kecukupan, responsivitas, ketepatan, dan proses pengembangan berada pada kategori baik, yang menandakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengembangan TWA sudah cukup tepat sasaran, bermanfaat, serta didukung oleh proses pengembangan yang berkelanjutan.

Adapun indikator yang masih berada pada kategori cukup baik adalah efisiensi dan pemerataan. Efisiensi belum optimal karena keterbatasan anggaran, pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal, serta fasilitas dan pelayanan yang belum sepenuhnya seimbang dengan potensi dan jumlah pengunjung. Sementara itu, indikator pemerataan belum maksimal karena manfaat ekonomi dari keberadaan TWA belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, masih didominasi oleh kelompok tertentu yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan peran masyarakat, kewenangan desa, serta belum optimalnya pemberdayaan Pokdarwis.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Abdullah, S., Hamim, S., Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Amerta, I. M. S. (2019). *Pengelolaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Fandeli, C. (2011). *Dasar-dasar manajemen kepariwisataan alam*. Yogyakarta: Liberty.

- Hamim, S. (2019). *Sistem perencanaan strategis dalam pembangunan*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Hamim, S., dan Adnan, I. M. (2013). *Manajemen strategis pembangunan daerah dan pedesaan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hamim, S., Karya, D., Indrastuti, S., Zubaidah, E., Yuna, S. E. (2022). Teamwork strategy of the development planning consultative team of the food security program. *Social Science Journal*, 12(4), 2278-2289.
- Hamim, S., Vianda, L. (2019). Strategi pembangunan kontekstual terpadu sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi pengolahan menjadi pakan ternak dan ikan. *Jurnal PUBLIKA*, 5(2), 206-216.
- Hamim, S., Vianda, L., Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip prinsip pelayanan publik di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dinas kependudukan dan catatan sipil kota pekanbaru. *Jurnal PUBLIKA*, 6(1), 1-10.
- Monika, T., & Prakoso, A. A. (2023). Evaluasi pengembangan desa wisata: Studi kasus pada Desa Wisata Pacarejo Gunungkidul. *Journal of Tourism and Economic*, 6(1), 11–26.
- Natsir, M. (2019). *Strategi pembangunan daerah*. Makassar: Pustaka Timur Press.
- Nugroho, R. (2016). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Salsabila, I. A., & Santoso, R. S. (2023). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Soedijono. (2011). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, S. A., & Arsyad, Y. (2024). Evaluasi pemanfaatan potensi pariwisata melalui pendekatan community based tourism di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Publisitas*, 11(1), 1–10.
- Sutiarso, B. (2025). *Manajemen pariwisata: Teori dan implementasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tazri, M. (2021). Pengelolaan objek wisata desa buluh cina untuk meningkatkan perekonomian melalui digital marketing. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(2), 149–154.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- William, N. Dunn. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yenti, N. S., Yusran, R., Alhadi, Z., & Fajri, H. (2024). Evaluasi pengelolaan kebijakan kepariwisataan, objek wisata Danau Diatas, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 5(1), 1–8.